

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting. Pengertian terhadap objek yang diteliti merupakan salah satu unsur dalam pemahaman, untuk itu peneliti menjelaskan variabel yang terdapat dalam penelitian.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik ataupun batas bagian dalam suatu negara dan juga diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain (Mariyanti, 2010). Terdapat dua dimensi dalam migrasi, yaitu dimensi waktu dan dimensi daerah. Untuk dimensi waktu, ukuran yang pasti tidak ada karena sulit untuk menentukan berapa lama seseorang pindah tempat tinggal untuk dapat dianggap sebagai seorang migran, tetapi biasanya digunakan definisi yang ditentukan dalam sensus penduduk.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), migrasi merupakan perpindahan tempat tinggal yang melampaui batas provinsi, dengan batas waktu yang tinggal di tempat tujuan selama enam bulan atau lebih. Jadi secara umum migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah asal menuju daerah tujuan dengan tujuan untuk menetap.

Menurut Lee (1996), migrasi merupakan perubahan tempat tinggal yang permanen atau semi permanen dengan tidak ada batasan mengenai jarak yang

ditempuh. Kemudian Lee menekankan migrasi merupakan adanya perubahan tempat tinggal yang dilakukan dengan cara sukarela atau terpaksa, baik yang terjadi antarnegara maupun masih dalam satu negara. Beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan migrasi menurut Lee (1996), sebagai berikut:

1. Faktor dari daerah asal berkaitan dengan lahan pekerjaan, jenis pekerjaan yang tidak beragam, upah rendah, tidak memiliki lahan sendiri, dan kondisi dimana terjadi masa menunggu antara masa panen dan masa tanam.
2. Faktor yang datang dari daerah tujuan berkaitan dengan kondisi yang berbeda dengan daerah asal.
3. Faktor penghalang antara daerah asal dengan daerah tujuan berupa fasilitas transportasi maupun jarak.
4. Faktor dari diri sendiri yang menentukan keputusan bermigrasi.

2.1.1.1 Teori Migrasi Todaro

Teori Todaro (1989) mengasumsikan bahwa migrasi desa-kota pada dasarnya merupakan suatu fenomena ekonomi. Oleh karena itu, keputusan dalam melakukan migrasi merupakan suatu keputusan yang telah dirumuskan secara rasional. Todaro (1985) juga menyatakan bahwa arus migrasi berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan antara kota dengan desa. Seseorang baru akan memutuskan untuk melakukan migrasi jika penghasilan bersih di kota melebihi penghasilan bersih yang tersedia di desa. Model migrasi Todaro (1989) memiliki tiga pemikiran dasar sebagai berikut:

1. Migrasi desa-kota dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan ekonomi rasional yang langsung berkaitan dengan keuntungan atau manfaat dan biaya-biaya relatif migrasi itu sendiri.
2. Keputusan untuk bermigrasi tergantung pada selisih antara pendapatan yang diharapkan di kota dan tingkat pendapatan aktual di pedesaan serta besar atau kecilnya kemungkinan mendapatkan pekerjaan di perkotaan yang menawarkan tingkat pendapatan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Kemungkinan mendapatkan pekerjaan di perkotaan berkaitan langsung dengan tingkat lapangan pekerjaan di perkotaan, sehingga berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan.

Todaro (1989) menyatakan migrasi merupakan suatu proses yang mempengaruhi individu secara selektif dengan ciri-ciri ekonomi, sosial, pendidikan, dan demografi tertentu, maka pengaruh faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi dari masing-masing individu bervariasi. Beberapa faktor non-ekonomis yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan migrasi adalah:

1. Faktor sosial, keinginan para migran untuk melepaskan dari kendala tradisional yang terkandung dalam organisasi sosial yang sebelumnya mengekang mereka.
2. Faktor fisik, pengaruh iklim dan bencana alam, seperti banjir dan kekeringan.
3. Faktor demografi, penurunan tingkat kematian yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan penduduk suatu tempat.

4. Faktor kultural, pembinaan kelestarian hubungan keluarga besar yang berada pada tempat tujuan migrasi.
5. Faktor komunikasi, kualitas seluruh sarana transportasi, sistem pendidikan yang cenderung berorientasi pada kehidupan kota dan dampak-dampak modernisasi yang ditimbulkan oleh media massa atau media elektronik.

2.1.1.2 Teori Migrasi Ravenstein

Teori migrasi menurut Ravenstein (1985) menjelaskan tentang perilaku migrasi yang disebut dengan hukum migrasi yang sesuai hingga sekarang. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Para migran cenderung memiliki tempat tinggal terdekat dengan daerah tujuan.
2. Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi adalah sulitnya memperoleh pendapatan yang lebih baik di daerah.
3. Berita dari saudara atau teman yang telah pindah ke daerah lain merupakan informasi yang sangat penting.
4. Informasi yang negatif dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk untuk bermigrasi.
5. Makin tinggi pengaruh kekotaan terhadap seseorang, makin tinggi frekuensi mobilitas orang tersebut.
6. Makin tinggi pendapatan seseorang, makin tinggi frekuensi mobilitas orang tersebut.

7. Para migran cenderung memiliki daerah dimana telah terdapat teman atau saudara yang bertempat tinggal di daerah tujuan.
8. Pola migrasi bagi seseorang maupun sekelompok penduduk sulit untuk diperkirakan.
9. Penduduk yang masih muda dan belum menikah lebih banyak melakukan migrasi dibandingkan mereka yang berstatus menikah.
10. Penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi biasanya lebih banyak mobilitasnya dibandingkan yang berpendidikan rendah.

2.1.1.3 Jenis - Jenis Migrasi

Menurut Adioetomo dan Samosir (2010) untuk memudahkan studi dan analisis tentang migrasi yang sangat berguna untuk pengukuran maka migrasi dapat dibedakan atas beberapa jenis:

1. Migrasi masuk (*in-migration*), adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan.
2. Migrasi keluar (*out migration*), adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal.
3. Migrasi neto (*net migration*), merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar, maka disebut migrasi neto positif, sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk, maka disebut migrasi neto negatif.
4. Migrasi bruto (*gross migration*), merupakan jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar.

5. Migrasi seumur hidup (*life time migration*), merupakan migrasi yang terjadi antara saat lahir dan saat sensus atau survey.
6. Migrasi risen (*resent migration*), merupakan migrasi yang melewati batas provinsi dalam kurun waktu tertentu sebelum penghitungan, misalnya lima tahun sebelum sensus atau survey. Jumlah migran masuk risen ke suatu provinsi adalah banyaknya penduduk di provinsi tersebut yang lima tahun lalu bertempat tinggal di luar provinsi tersebut. Jumlah migran keluar risen dari suatu provinsi adalah jumlah penduduk yang saat pencacahan tinggal di provinsi lain dan lima tahun yang lalu tinggal di provinsi tersebut.
7. Migrasi total (*total migration*), merupakan migrasi antar provinsi tanpa memperhatikan kapan perpindahannya, sehingga provinsi tempat tinggal sebelumnya berbeda dengan provinsi tempat tinggal saat penghitungan.
8. Migrasi Internasional (*International Migration*), merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. migrasi yang masuk ke suatu negara disebut imigrasi, sebaliknya jika migrasi itu keluar dari suatu negara, maka disebut emigrasi.
9. Arus migrasi (*migration stream*), merupakan sekelompok migrasi yang daerah asal dan tujuan migrasinya dalam suatu periode migrasi yang diberikan.
10. Angka migrasi parsial (*partial migration rate*), merupakan banyaknya migran dari suatu daerah asal ke suatu daerah tujuan atau sebaliknya.
11. Urbanisasi (*urbanization*), merupakan bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah perkotaan yang disebabkan oleh penambahan

penduduk wilayah perkotaan, perpindahan ke perkotaan, dan akibat dari perluasan daerah perkotaan.

12. Transmigrasi (*transmigration*), merupakan perpindahan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap di daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang.

2.1.2 Upah

Menurut teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu (Sukirno, 2013). Definisi lain upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai suatu persetujuan atas peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya (Sumarsono, 2003).

2.1.2.1 Teori Upah

A. Kenaikan Upah Ricardo

Ricardo mencoba menunjukkan bahwa hanya dalam kondisi lain pemupukan modal akan mengurangi keuntungan. Di dalam sistem Ricardo, upah memainkan peranan aktif dalam menentukan pendapatan

antara modal dengan buruh. Tingkat upah meningkat bila harga barang yang dibutuhkan buruh meningkat (Jhingan, 2014).

B. Cadangan upah oleh Mill

Menurut Mill, elastisitas penawaran tenaga kerja sangat tinggi dalam menanggapi kenaikan upah. Upah pada umumnya melebihi tingkat penghidupan minimum. Upah dibayarkan dari modal, oleh karena itu upah dibatasi oleh cadangan modal yang ada yang dipersiapkan untuk membayar upah. Jadi upah per kepala dapat dihitung dengan membagi keseluruhan modal yang berputar dengan penduduk yang bekerja (Jhingan, 2014).

2.1.2.2 Pengertian Upah Minimum

Upah Minimum merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003). Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi. Sebagaimana yang telah di atur dalam PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas kerja.

Di Indonesia, pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 15/2018 dalam pasal 1 ayat 1 Upah Minimum di definisikan “Upah Minimum adalah Upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman”. Upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang *low skilled*. Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional.

2.1.2.3 UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan upah bulanan terendah bagi pekerja atau buruh yang bekerja nol tahun sampai dengan satu tahun dan waktu kerja tujuh jam sehari, empat puluh jam seminggu bagi sistem waktu kerja enam hari kerja dalam seminggu atau delapan jam sehari dan empat puluh jam seminggu bagi sistem lima hari kerja dalam satu minggu.

UMK merupakan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku di suatu wilayah kota/kabupaten. Upah minimum hanya ditujukan untuk pekerja dengan masa kerja nol sampai dengan satu tahun (Sumarsono, 2003). Terdapat dua unsur penting dari upah minimum kabupaten/kota, yaitu:

1. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali dia diterima bekerja.

2. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

2.1.2.4 Hubungan Upah dengan Migrasi

Motivasi seseorang dalam melakukan migrasi adalah motif ekonomi. Todaro (1985) menyatakan bahwa arus migrasi berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan antara kota dengan desa. Seseorang baru akan memutuskan untuk melakukan migrasi jika penghasilan bersih di kota melebihi penghasilan bersih yang tersedia di desa. Semakin tinggi upah yang didapatkan seseorang maka semakin tinggi pula kesejahteraan yang dapat dicapai dan memilih untuk menetap di daerah tujuan. Upah pendapatan di daerah Jawa Barat yang besar dan menjanjikan menjadi faktor utama seseorang untuk bermigrasi dengan tujuan meningkatkan perekonomian.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi (BPS, 2022). Secara struktur ekonomi, PDRB dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang dominan di suatu daerah (Wahyuningtyas et al., 2013). Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

PDRB merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah atau regional tertentu dan dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian (Hasibuan et al., 2022). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi makro yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan perekonomian suatu wilayah (Prishardoyo, 2008). Di dalam penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang di timbulkan dari suatu region, ada 3 pendekatan yang digunakan yaitu:

1. PDRB menurut pendekatan produksi, merupakan jumlah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
2. PDRB menurut pendekatan pendapatan, merupakan balas jasa yang digunakan oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu.
3. PDRB menurut pendekatan pengeluaran, merupakan semua komponen pengeluaran akhir seperti: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu.

2.1.3.1 Hubungan PDRB dengan Migrasi

Variabel ekonomi yang juga berpengaruh terhadap migrasi masuk adalah PDRB yang merupakan penghasil yang meningkatkan ekonomi daerah. Tingginya PDRB di suatu daerah akan menjadi daya tarik untuk dijadikan daerah tujuan,

seperti yang diungkapkan Lee (1996) pada *push and pull theory*. Selain menjadi faktor penarik untuk dijadikan daerah tujuan, PDRB di daerah asal yang tertinggal menjadi faktor pendorong terjadinya migrasi. Keberadaan faktor pendorong dan faktor penarik menjadi penentu terjadinya migrasi.

2.1.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses, teknik, dan metode belajar mengajar dengan maksud memberikan pengetahuan dari seseorang kepada orang lain melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan juga merupakan salah satu dari empat tujuan negara yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1, pada dasarnya jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan. Jenjang pendidikan formal seperti yang tertuang dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Bab VI Pasal 14 yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas:

1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun. Diselenggarakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun disekolah menengah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan yang memberikan bekal dasar bagi perkembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat.

2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan pendidikan yang diselenggarakan bagi pendidikan dasar. Pendidikan menengah merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum, pendidikan menengah agama, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan menengah luar biasa.

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademis atau profesional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

Menurut Kemendikbud keberhasilan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator, yaitu:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah.

2.1.4.1 Hubungan Pendidikan dengan Migrasi

Seseorang melakukan migrasi di karenakan pendidikan pada daerah asalnya yang masih terbelakang dan belum mengalami kemajuan. Seseorang yang

bermigrasi berharap dan bertujuan memiliki pendidikan yang lebih maju dan lebih luas, yang nantinya dapat berguna untuk bangsa dan negara serta daerah asalnya.

2.1.5 Akses Kesehatan

Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan pusat dari penyelenggara sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Hal ini penting karena pengukuran kegunaan dan akses dalam pemberian pelayanan merupakan bagian dari sistem kebijakan kesehatan yang ada. Akses kesehatan merupakan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Akses bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan, mencari dan mendapatkan sumber daya dan menawarkan pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna (Levesque et al., 2013). Faktor-faktor akses terhadap pelayanan kesehatan yang dipengaruhi oleh kemampuan pengguna diantaranya:

1. Kemampuan menerima (kepercayaan dan harapan).
2. Kemampuan mencari (nilai sosial, budaya dan gender).
3. Kemampuan menjangkau (lingkungan tempat tinggal, transportasi dan dukungan sosial).
4. Kemampuan membayar (pendapatan, asset dan asuransi).
5. Kemampuan ikut serta (ketaatan, *support*).

2.1.5.1 Hubungan Akses Kesehatan dengan Migrasi

Zhao (1999) menyatakan bahwa kelengkapan fasilitas kesehatan dan infrastruktur di kota merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan melakukan migrasi. Seseorang yang melakukan migrasi tentu ingin mendapatkan

fasilitas kesehatan yang memadai dan menjamin kesehatan mereka terjaga di kota tujuan.

2.2 Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Trendyari dan Yasa (2014) yang membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi masuk ke Kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel sosial-ekonomi yaitu pendapatan, kesempatan kerja, investasi, akses pelayanan pendidikan, dan akses pelayanan kesehatan terhadap migrasi masuk ke Kota Denpasar. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *binary logistic regression*. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel pendapatan, kesempatan kerja, investasi, akses pelayanan pendidikan, dan akses pelayanan kesehatan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap migrasi masuk ke Kota Denpasar. Variabel pendapatan, kesempatan kerja, dan investasi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel akses pelayanan pendidikan dan akses pelayanan kesehatan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap migrasi masuk ke Kota Denpasar. Variabel pendapatan berpengaruh paling dominan terhadap migrasi masuk ke Kota Denpasar.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Maulida (2013) melakukan studi yang berjudul pengaruh tingkat upah terhadap migrasi masuk di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh upah terhadap arus migrasi di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah berpengaruh signifikan terhadap jumlah migrasi masuk di Kota Pekanbaru.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Husnah (2019) melakukan studi yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi seumur hidup di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat (1) Pengaruh pendidikan terhadap migrasi masuk seumur hidup di Indonesia. (2) Pengaruh upah terhadap migrasi seumur hidup di Indonesia. (3) Pengaruh kesempatan kerja terhadap migrasi seumur hidup di Indonesia. (4) Pengaruh pernikahan terhadap migrasi seumur hidup di Indonesia. (5) Pengaruh pendidikan, kesempatan kerja, dan upah secara bersama-sama terhadap migrasi seumur hidup di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ordinary Least Square* (OLS) dengan menggunakan *fixed effect model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap migrasi seumur hidup. Secara parsial variabel upah, kesempatan kerja, dan pernikahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi seumur hidup di Indonesia. secara bersama-sama variabel pendidikan, upah, kesempatan kerja dan pernikahan berpengaruh signifikan terhadap migrasi seumur hidup di Indonesia.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Anggara *et al.* (2019) melakukan studi yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi masuk di Kota Jambi (studi kasus etnis Jawa di Kelurahan Buluran Kenali). Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui karakteristik penduduk etnis Jawa di Kelurahan Buluran Kenali; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis umur, asal, tingkat pendidikan dan lama tinggal terhadap pendapatan penduduk migran etnis Jawa di Kelurahan Buluran Kenali. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif, dengan menggunakan analisis

regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata umur migran adalah 44 tahun, berstatus kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang, pendidikan yang berhasil ditamatkan rata-rata 10 tahun, berasal langsung dari Pulau Jawa, dengan alasan pindah ke Kota Jambi dikarenakan ajakan keluarga dan mengetahui Kota Jambi dari keluarga/teman. Dari hasil regresi linier berganda diketahui bahwa umur, asal, tingkat pendidikan, dan lama tinggal berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan penduduk migran etnis Jawa di Kota Jambi, sedangkan daerah asal tidak berpengaruh terhadap pendapatan para migran. Secara parsial, umur, pendidikan dan lama tinggal berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan migran etnis Jawa di Kota Jambi, sedangkan asal tidak berpengaruh dan terhadap pendapatan migran etnis Jawa di Kota Jambi.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Suharto (2018) melakukan studi yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi masuk risen di Provinsi Kalimantan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah, pengaruh pekerjaan, investasi dan pengeluaran modal untuk migrasi meningkat di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan, ketenagakerjaan berpengaruh positif dan signifikan, investasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan tentang migrasi masuk risen di Kalimantan Timur.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Mariyanti (2010) melakukan studi yang berjudul pengaruh industrialisasi terhadap migrasi per provinsi di Indonesia pada tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak

industrialisasi terhadap migrasi menurut provinsi pada tahun 2010. Berdasarkan teori dan temuan sebelumnya dalam penelitian ini memperkirakan bahwa ada pengaruh industri lapangan kerja sektor, dan tingkat upah terhadap migrasi antar provinsi pada tahun 2010, penelitian ini menyimpulkan bahwa kontribusi sektor industri dalam PDRB memiliki pengaruh positif terhadap migrasi antarprovinsi, kontribusi sektor industri terhadap lapangan kerja berpengaruh positif terhadap migrasi signifikan sebesar 5%. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan Eviews-4.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Puspitasari dan Kusreni (2017) melakukan studi yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh dari pengangguran, PDRB per kapita, rata-rata lama pendidikan, dan persentase migrasi tenaga kerja ke luar Indonesia menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Hasil analisis dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel jumlah pengangguran, PDRB per kapita, rata-rata tahun pendidikan, dan kemiskinan simultan berpengaruh signifikan terhadap migrasi tenaga kerja keluar Indonesia. Pengangguran dan kemiskinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Namun, rata-rata tahun pendidikan dan PDRB per kapita secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap migrasi tenaga kerja.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Julianto dan Alvian (2017) melakukan studi yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat migrasi keluar Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat

perkembangan migrasi internal keluar Sumatera Barat dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya migrasi internal keluar Sumatera Barat. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh rasio upah riil terhadap tingkat migrasi keluar Sumatera Barat adalah positif dan signifikan, yang berarti jika terjadi kenaikan variabel rasio upah riil maka tingkat migrasi keluar Sumatera Barat akan semakin tinggi dan disamping itu Jarak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat migrasi keluar Sumatera Barat. Sedangkan pada variabel rasio proporsi nilai tambah sektor industri dalam pembentukan PDRB daerah asal tidak signifikan.

